



**RENCANA PROGRAM  
BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DPP KBPP POLRI**

Oleh :  
Ketua Bidang KUMHAM DPP KBPP POLRI

# LATAR BELAKANG

- ▶ Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah dasar dari Negara Hukum. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu hal penting dalam Pembangunan Hukum. Salah satu agenda penting Pemerintah Indonesia saat ini adalah menata Peraturan Perundang-undangan. Penataan itu mulai dari UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Juga penataan kesesuaian secara materi muatan dengan apa yang diatur UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019. Dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b UU tersebut menyatakan bahwa salah satu asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan. Asas inilah yang sering terlewatkan para pihak pada saat membentuk Peraturan Perundang-undangan.

# LATAR BELAKANG.....

- ▶ Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kodrat yang melekat pada diri setiap manusia. Indonesia adalah bangsa yang aktif memperjuangkan HAM di berbagai forum internasional. Kondisi demikian yang mendorong Pemerintah semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan isu HAM. Tetapi semua itu bisa menjadi sia-sia jika dalam lingkup nasional masih ada Peraturan Perundang-undangan yang tidak ramah HAM. Kenyataannya masih banyak regulasi di Indonesia yang patut diduga melanggar HAM. Pemerintah telah berupaya agar setiap Peraturan Perundang-undangan haruslah berasaskan kemanusiaan. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Permenkumham RI No. 24 Tahun 2017 yang mana mengatur sedemikian rupa bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

- ▶ Sesuai dengan amanah Musyawarah Nasional (Munas) V KBPP Polri dan tindak lanjut acara pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KBPP Polri masa bakti 2021 - 2026 perlu segera diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) guna membuat rumusan-rumusan berbagai program kerja untuk merealisasikan visi misi organisasi yang ada. Rakernas diperlukan dalam rangka penggalangan, konsolidasi dan kaderisasi organisasi guna melakukan revitalisasi organisasi dan memantapkan positioning KBPP Polri sebagai Ormas Role Model. Karenanya Rakernas hadir dengan maksud untuk menyelaraskan arah dan tujuan organisasi secara bijak, terarah, dan terukur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada.

## MAKSUD DAN TUJUAN....

- ▶ DPP KBPP Polri memandang bahwa penyelenggaraan Rakernas harus dilaksanakan secara terencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna memetakan (mapping) berbagai persoalan yang ada guna menghasilkan rumusan-rumusan komprehensif untuk kemajuan dan kemandirian organisasi, mulai dari Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah. Rakernas diperlukan untuk menentukan sikap dan langkah-langkah strategis organisasi serta sekaligus sarana evaluasi dan juga dalam rangka ikut berpartisipasi dalam memecahkan beragam persoalan yang ada.

# PROGRAM BIDANG KUMHAM

- ▶ Berdasarkan pemikiran di atas KBPP Polri sebagai perpanjangan tangan dari fungsi Binmas Polri harus ikut menjaga dan mengawal perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat serta membangun kemitraan (*partnership building*) di lingkungan masing-masing sesuai dengan penegasan yang tertuang dalam PERKAP 03 Tahun 2015 tentang “Pemolisian Masyarakat”, maka dirumuskanlah Program Kerja Bidang DPP KBPP Polri yang mengacu pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pengembangan organisasi, yaitu (1) Pemanfaatan Teknologi (2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (3) Penataan Organisasi dan (4) Penguatan Hubungan Internal dan Eksternal.

# PROGRAM BIDANG KUMHAM.....

- ▶ Program Kerja Bidang sebagai bagian dari proses pengembangan organisasi dan pembangunan bangsa serta untuk lebih meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi. Berikut ini adalah rumusan Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP KBPP Polri Masa Bakti 2021 - 2026 yang dirumuskan berdasarkan apa yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi serta tantangan dan kebutuhan organisasi yang diperlukan hari ini dan ke depan dalam rangka merawat dan menumbuhkembangkan organisasi dalam aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia pada semua level organisasi.

# PROGRAM 1 : MENGEMBANGKAN STANDARDISASI FORMAT SURAT

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan mengembangkan Standardisasi Format Surat
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 3 (Penataan Organisasi)
3	OUTPUT	Terbentuknya Format Surat Baku & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Sosialisasi dan Implementasi Format Surat Baku
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	-
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 2 : MEMBUAT KORWIL OTORISASI PRODUK HUKUM

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Membentuk dan mengembangkan Korwil untuk Otorisasi Produk Hukum
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 3 (SDM dan Organisasi)
3	OUTPUT	Terbentuknya Sistem Otorisasi Produk Hukum & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Sosialisasi dan Implementasi Korwil
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang Kominfo DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	DPD KBPP Polri Se Indonesia
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 3 : MEMBUAT BUKU SEJARAH KBPP POLRI

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan Menerbitkan Buku Sejarah KBPP Polri
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 3 (Penataan SDM dan Organisasi)
3	OUTPUT	Terbitnya Buku Sejarah KBPP Polri & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Membuat Buku Digital dan Audio Book Sejarah KBPP Polri
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	Mabes Polri dan Polda
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 4 : RAKOR BIDANG HUKUM DAN HAM

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan menyelenggarakan Rakornas Bidang Hukum dan HAM
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 3 (Penataan Organisasi)
3	OUTPUT	Terselenggaranya Rakornas & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Mendorong DPD KBPP Polri melaksanakan Rakorda
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	DPD KBPP Polri Se Indonesia
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 5 : MEMBUAT POS BANTUAN HUKUM

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan mengembangkan Pos Bantuan Hukum
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2, 3 dan 4 (Penataan SDM, Organisasi dan Hubungan)
3	OUTPUT	Terbangunnya Pos Bantuan Hukum dan Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Mendorong DPD KBPP Polri membentuk Pos Bantuan Hukum Daerah
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	DPD KBPP Polri Se Indonesia
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

# PROGRAM 6 : MEMBUAT DATABASE ANAK POLISI BERPROFESI PENGACARA

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan mengembangkan Database Anak Polisi Berprofesi Pengacara
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2, 3 dan 4 (SDM, Organisasi dan Hubungan)
3	OUTPUT	Terbentuknya Database & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Membuat Forum Komunikasi Pengacara Putra Putri Polri
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	Mabes Polri dan Polda
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 7 : SEMINAR BAHAYA NARKOTIKA

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan menyelenggarakan Seminar Bahaya Narkoba
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (Penataan SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Tumbuhnya Kesadaran Anti Narkoba dan Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Roadshow Anti Narkoba ke Daerah
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang SosKes DPP KBPP Pol
8	KOLABORASI	BNN/Rumah Sakit Ketergantungan Obat
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 8 : SEMINAR ANTI RADIKALISME

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan menyelenggarakan Seminar Anti Radikalisme
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (Penataan SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Tumbuhnya Kesadaran Anti Radikalisme dan Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Roadshow Anti Radikalisme ke Daerah
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	BNPT/BIN
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

# PROGRAM 9 : SEMINAR PROBLEM KETENAGAKERJAAN

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan menyelenggarakan Seminar Problem Kenegakerjaan di Indonesia
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (Penataan SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Mapping Problem Ketenagakerjaan & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Roadshow Ketenagakerjaan ke Daerah
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang Kumham DPP KBPP Polri
8	KOLABORASI	Kemenaker
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

# PROGRAM 10 : PENYULUHAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMASYAKATAN

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan menyelenggarakan Penyuluhan Hukum pada Lembaga Pemasyarakatan
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Meningkatnya Kesadaran Hukum & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	-
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang Kumham DPP KBPP Pol
8	KOLABORASI	Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

# PROGRAM 11 : PENYULUHAN HUKUM PADA MASYARAKAT PEDESAAN

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Merancang dan menyelenggarakan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Desa
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Meningkatnya Kesadaran Hukum & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	-
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang Kumham DPP KBPP Pol
8	KOLABORASI	Dirjen Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Kemendagri
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 12 : MEMBUAT KELURAHAN BINAAN

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Membentuk dan mengembangkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (Penataan SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Membentuk dan mengembangkan Jaringan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP UMKM
8	KOLABORASI	Dirjen Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Kemendagri
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PROGRAM 13 : MEMBUAT SATGAS PEMANTAU PEMILU 2024

NO	ITEM PROGRAM	URAIAN ITEM PROGRAM
1	TUJUAN	Membentuk dan mengembangkan Satuan Tugas Pemantau Pemilu 2024
2	NILAI STRATEGIS	Pilar 2 dan 4 (Penataan SDM dan Hubungan)
3	OUTPUT	Terbentuknya Satgas Pemilu & Pencitraan Organisasi
4	LOKASI	Sekretariat KBPP Polri
5	JADWAL	Tentatif
6	TINDAK LANJUT	Mendorong DPD KBPP Polri membentuk Satgas Pemantau Pemilu Daerah
7	LINTAS BIDANG	Bidang Kesekjenan/Bidang OKK DPP KBPP
8	KOLABORASI	KPU/Bawaslu
9	PIC	Bidang Kumham DPP KBPP Polri
10	ANGGARAN	Terlampir

## PENUTUP

- ▶ Bahwa Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP KBPP Polri dirumuskan dalam rangka penggalangan, konsolidasi dan kaderisasi organisasi dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Daerah guna memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan organisasi dan bangsa.
- ▶ Bahwa Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP KBPP Polri merupakan acuan program kerja nasional bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan peninjauan ulang apabila kelak kemudian hari dibutuhkan penyempurnaan.

**TERIMA KASIH**



**KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI**